

BAB I

PENDAHULUAN

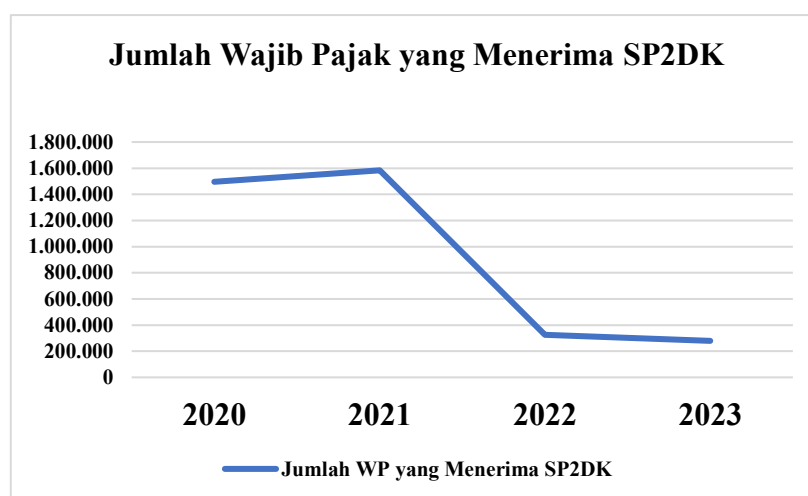
Dalam bab ini akan memberikan pemaparan mengenai latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, dan cara pengumpulan data. Penyusunan bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai alasan mengapa memilih topik tersebut.

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, setiap wajib pajak (WP) memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, seluruh WP badan termasuk perusahaan seperti PT XYZ, diwajibkan untuk melapor pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh WP tersebut. Namun, dalam praktiknya terdapat banyak faktor yang menyebabkan perbedaan antara perhitungan pajak yang dilaporkan dengan yang di hitung oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Sejalan dengan sistem pemungutan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu menggunakan *self assessment system*. *Self assessment* digunakan untuk menunjukan proses pemungutan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan. Namun, pemungutan pajak menggunakan Sistem *self assessment* ini besar kemungkinan Wajib Pajak melakukan kesalahan atau tidak sesuai yang menyebabkan sering terjadi selisih perhitungan pajak yang mengarah pada di terbitkannya SP2DK.

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan (SP2DK) adalah surat yang dikeluarkan oleh DJP untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak mengenai data dan/atau informasi yang diduga menyebabkan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. SP2DK di atur dalam surat edaran Direktur Jendral Pajak No. SE- 05//PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan menerbitkan SP2DK

sebagai bentuk pengawasan dalam menjalankan tugasnya melalui AR (*Account Representative*) dengan menganalisis data Wajib Pajak. SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena adanya dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan SP2DK dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan dengan pendapatan atau aset yang benar. SP2DK akan di sampaikan melalui jasa kurir, fax atau secara langsung secara langsung baik pada saat kunjungan, telepon, atau bahkan *video conference*. Dengan itu Wajib Pajak yang menerima SP2DK diwajibkan untuk memberikan klarifikasi atas temuan yang disampaikan oleh *Account Representative* (AR) sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Setelah Wajib Pajak menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) WP di beri waktu 14 hari kerja untuk memberikan tanggapan atas SP2DK tersebut. Dampak untuk Wajib Pajak sendiri apabila tidak menanggapi SP2DK maka akan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas KPP dan memungkinkan prosedur pemriksaanya lebih panjang, sehingga untuk menghindari hal tersebut WP lebih baik menanggapi SP2DK tersebut. Dan agar lebih mudah menyampaikan klarifikasi dan bukti pendukungnya Wajib Pajak dapat berkomunikasi dengan AR (*account Representative*).



Gambar 1. 1 Realisasi SP2DK Dari Tahun 2020-2023

Pada tahun 2020 hingga tahun 2023 dari data Laporan Tahunan Ditjen Pajak (DJP) pada gambar di atas menunjukkan adanya lonjakan penurunan di tahun 2022 sampai tahun 2023 yang sangat signifikan. Dan dapat dijelaskan bahwa tahun 2020 hingga 2021, jumlah WP yang menerima SP2DK relatif tinggi, yaitu berada di angka 1,4 juta sampai 1,5 juta hal ini disebabkan karena DJP menggunakan strategi pengawasan perpajakan yang masih kuantitatif dan luas dimana DJP fokus mengirimkan SP2DK kepada WP yang terindikasi memiliki ketidak sesuaian data. Sedangkan mulai dari tahun 2022 terjadi penurunan yakni menjadi 400 ribuan SP2DK dan berlanjut ke tahun 2023 menurun di angka 300 ribuan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan strategi pengawasan yang dilakukan oleh DJP dari pendekatan kualitatif menjadi pendekatan yang lebih selektif. Dengan adanya penurunan WP yang menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) secara signifikan, efektivitas pengawasan justru lebih meningkat karena tepat sasaran dan berkontribusi langsung terhadap penerimaan negara.

Menurut DDTC News (2024) “Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan pengawasan yang lebih terfokus pada nilai potensi penerimaan pajak sehingga yang diprioritaskan adalah SP2DK yang berpotensi tinggi untuk dicairkan”. Maksud dari kutipan tersebut adalah penurunan SP2DK bukan disebabkan oleh pengawasan pajak melemah melainkan strategi pengawasan yang lebih selektif. Penerbitan SP2DK dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap penerimaan pajak serta dapat mengukur kinerja pemerintah dalam melaksanakan kebijakan termasuk dalam pengawasan pajak melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Perubahan ini sangat penting untuk di analisis karena alat untuk mendorong kepatuhan WP sebelum terjadi pemeriksaan. Melalui SP2DK ini DJP dapat mengetahui ketidak sesuaian data, menggali potensi penerimaan pajak, pengawasan, kepatuhan dan optimalisasi penerimaan negara.

Tabel 1. 1 Tabel Realisasi SP2DK

Tahun	Produksi SP2DK	SP2DK Selesai	Jumlah WP yang menerima SP2DK	Jumlah WP dengan SP2DK selesai	Nilai SP2DK
2020	2.424.701	1.333.443	1.496.513	817.846	66,86 Triliun
2021	3.730.574	2.870.133	1.583.787	1.347.605	37,95 Triliun
2022	525.683	404.825	324.408	248.845	33,22 Triliun
2023	387.089	339.964	279.102	244.174	21,18 Triliun

Sumber : Laporan Tahunan DJP (2020-2023)

Dapat di jelaskan pula pada Tabel di atas ditahun 2021 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterbitkan mencapai 3.730.574 Surat terjadi peningkatan di banding tahun 2020 yang hanya memproduksi SP2DK sekitar 2.424.701 surat. Sedangkan pada tahun 2022 sampai tahun 2023 terjadi penurun yang sangat drastis sebesar 85,9% - 90% pada produksi SP2DK. Jadi dapat di simpulkan bahwa untuk tahun 2020 dan 2021 produksi SP2DK relatif kecil dari 2021 banyak surat yang di kirim tetapi jumlah penerimaan per suratnya berkurang. Sedangkan tahun 2022 sampai 2023 jauh lebih sedikit tetapi jumlah penerimaan lebih signifikan. Hal ini menunjukan bahwa terdapat perubahan strategi pengawasan yang lebih selektif dan lebih meningkat karena tepat sasaran. Pengawasan difokuskan kepada WP yang memiliki potensi untuk di cairkan, sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Meskipun jumlah penerbitan SP2DK menurun, namun mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan kas negara.

Berdasarkan data yang diambil dari Laporan Tahunan DJP tersebut dapat menunjukan bahwa masalah utama yang dihadapi Wajib Pajak adalah adanya kesalahan dalam pelaporan pajak sehingga memunculkan diterbitkanya SP2DK oleh fiskus. Oleh karena itu Pada kasus PT XYZ, Data yang akan dilakukan dalam penelitian lebih mendalam dalam menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, serta penetapan Pajak

Masukan dan Pajak Keluaran yang dilakukan oleh PT XYZ sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada masa pajak tersebut. Serta fokus pada identifikasi faktor penyebab terjadinya selisih antara pencatatan wajib pajak badan dan fiskus, yang dapat memicu penerbitan SP2DK ini.

PT XYZ merupakan perusahaan bergerak di bidang jual beli hewan ternak, khususnya sapi impor. Berdasarkan Peraturan Perpajakan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar daerah Pabean, oleh karena itu seharusnya PPN pada perusahaan ini dibebaskan namun perusahaan harus tetap melaporkan. Sebagai perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melapor PPh 21, PPh 23, PPh 25 Badan, dan PPN. Perusahaan rutin melakukan pelaporan SPT Masa dan menyelesaikan pembayaran pajak setiap bulannya sebelum Masa Pajak berakhir. PT XYZ terdeteksi terdapat beberapa temuan yang menyebabkan selisih yaitu di temukan empat akun yang dapat disimpulkan bahwa pada PT XYZ ini mengalami kurang bayar dan lebih bayar. Oleh karena itu, perusahaan harus segera melakukan tindak lanjut untuk melakukan klarifikasi dari selisih perhitungan yang terjadi. Sumber akun-akun tersebut atas pelaporan SPT Badan yang berasal dari laporan keuangan serta faktur penjualan, pembelian, dan PPN yang terjadi dalam transaksi perusahaan. PT XYZ melakukan pemenuhan perpajakan menggunakan sistem *self assessment system* yang memungkinkan akan terjadi ketidak sesuaian. Sehingga penyebab kesalahan tersebut memunculkan adanya selisih perhitungan pajak menurut WP dan fiskus dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badannya, sehingga DJP menerbitkan SP2DK.

Dengan Dikeluarkanya SP2DK pada PT. XYZ. Hal ini membuat tertarik untuk mengetahui permasalahan ini lebih mendalam dan fokus kepada satu klien yang berada di KJA Ashadi dan Rekan dalam

penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan (SP2DK). Maka dari itu, Tugas Akhir ini di beri judul **“Mekanisme Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Atas Selisih Perhitungan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan PT XYZ Pada KJA Ashadi dan Rekan”**.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai keperluan negara. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem *self Assesment* sistem diman Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Namun, sistem ini juga dapat menjadikan banyaknya kesalahan atau ketidak sesuaian dalam pelaporan, sehingga sering menimbulkan selisih antara penghitungan pajak oleh WP dan fiskus. Salah satu bentuk pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas ketidak sesuaian tersebut adalah dengan diterbitkannya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). PT XYZ, perusahaan yang bergerak di bidang penjualan beli sapi impor dan terdaftar sebagai PKP, menerima SP2DK dari KPP Cimahi akibat sejumlah perbedaan data antara laporan perpajakan dan data dari pihak ketiga, seperti Faktur Pajak Masukan. Beberapa temuan yang memicu SP2DK antara lain selisih nilai pembelian sapi, biaya transportasi, beban sewa kandang, serta beban gaji. Hal ini menunjukkan adanya potensi kurang bayar maupun lebih bayar pajak yang perlu segera ditindak lanjuti. Penelitian ini membahas secara khusus tentang mekanisme penyelesaian SP2DK yang diterima oleh PT XYZ, penelitian ini difokuskan pada proses penanganan SP2DK oleh KJA Ashadi dan Rekan selaku konsultan pajak, serta mengidentifikasi penyebab terjadinya selisih perpajakan antara Wajib Pajak dan fiskus. Berikut Poin-Poin yang akan di bahas:

1. Tinjauan Teoritis Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

2. Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
3. Prosedur Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
4. Perbedaan Teori dan Praktik Dalam Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Pada Wajib Pajak
5. Kendala dalam penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atas Selisih Perhitungan Pajak.
6. Upaya Internal dalam Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Dalam Penulisan Tugas Akhir terdapat tujuan dan juga kegunaan, berikut adalah tujuan dan kegunaan dari penulisan tugas akhir, tujuan penulisan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Tinjauan Teoritis Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)
2. Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
3. Prosedur Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
4. Perbedaan Teori dan Praktik Dalam Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Pada Wajib Pajak
5. Kendala dalam penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atas Selisih Perhitungan Pajak.
6. Pengendalian Internal dalam Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

1.3.1 Kegunaan Penulisan

Dalam Penulisan Tugas Akhir terdapat kegunaan penulisan berikut adalah kegunaan dari penulisan tugas akhir:

1. Bagi Mahasiswa

Manfaat penulisan ini adalah untuk menjadikan penelitian untuk memberikan manfaat, terutama dalam pengembangan pengetahuan di bidang perpajakan. Melalui Kuliah Kerja Peraktik ini dapat memperdalam pemahaman mengenai proses penyelesaian SP2DK, serta analisis perhitungan pajak yang sering menjadi permasalahan dalam dunia perpajakan. Selain itu penulisan penelitian ini juga dapat meningkatkan kemampuan menyusun laporan yang sistematis dan berbasis pada data dan fakta yang ada.

2. Bagi Instansi terkait

Bagi instansi terkait yang berkaitan dengan pengelolaan pajak, seperti Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan KJA Ashadi dan Rekan, laporan ini dapat memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi oleh WP badan dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka, khususnya terkait dengan SP2DK. Diharapkan, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan komunikasi dan penyelesaian sengketa perpajakan secara lebih efisien dan adil.

3. Bagi Akademisi

Bagi akademisi, Tugas Akhir ini dapat menjadi sumber referensi yang berguna dalam memperkaya literasi terkait masalah perpajakan, khususnya mengenai prosedur penyelesaian SP2DK pada WP badan. Penelitian ini dapat memberikan pandangan baru tentang cara-cara penyelesaian sengketa pajak yang melibatkan perusahaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi selisih perhitungan pajak. Dan di harapkan penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi yang bermanfaat dalam pengajaran dan penelitian lebih lanjut di bidang perpajakan.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir memerlukan adanya data yang berguna untuk acuan dalam penulisanya. Data yang penulis dapatkan

berasal dari KJA Ashadi dan Rekan kota Bandung dan dapat di pertanggung jawabkan.

1.4.1 Jenis Data

Dalam penyusunan Tugas Akhir membutuhkan data yang *real* dengan apa yang di bahas dan dapat dipertanggung jawabkan. Jenis data yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya, bukan langsung dari objek penelitian, seperti buku, jurnal ataupun artikel serta data yang diambil langsung dari instansi maupun perusahaan tempat Kuliah Kerja Praktik yang dapat di pertanggungjawabkan. Data yang penulis pakai berupa data terbitan SP2DK dari KPP yang diperuntukan PT. XYZ pada KJA Ashadi dan Rekan Kota Bandung. Data tersebut mencakup permasalahan dan bukti utama yang sudah *valid* yang dapat di pertanggungjawabkan yaitu berupa data harga pokok penjualan - pembelian sapi pada SPT tahunan badan bernilai lebih kecil dibandingkan dengan data pembelian sapi sesuai Faktur pajak masukan, terdapat selisih nilai biaya transportasi pada laporan keuangan dengan faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh lawan transaksi, Berdasarkan Faktur Pajak Masukan, Wajib Pajak menggunakan Jasa Penilaian Properti pihak ketiga XXXX & YYYY. Atas penggunaan jasa penilaian properti tersebut, Wajib Pajak belum melakukan pemotongan dan pelaporan SPT PPh Pasal 23, Terkait beban sewa kandang dan beban perbaikan & pemeliharaan kandang, terdapat perbedaan nilai signifikasi dengan beban yang di laporkan pada tahun 2022 hal tersebut membutuhkan kejelasan dokumen pendukung dan penjelasan lebih lanjut, terdapat selisih antara beban gaji pada SPT Tahunan Badan dengan jumlah nilai objek pajak PPh pada SPT Masa PPh Pasal 21.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam Penyusunan Tugas Akhir terdapat beberapa metode pengumpulan yang digunakan oleh penulis. Metode yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data Tugas Akhir sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu dengan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terkait Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) serta permasalahan yang terjadi selama melakukan Kuliah Kerja Praktik di KJA Ashadi dan Rekan

2. Metode Studi Pustaka

Metode yang di gunakan oleh penulis yaitu dengan teknik pengumpulan data menggunakan referensi seperti jurnal yang telah di publikasi di situs resmi. Selain itu, penulis juga menggunakan referensi dari situs resmi seperti website resmi KJA Ashadi dan Rekan.

3. Metode Wawancara

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu dengan teknik pengumpulan data dengan teknik tanya jawab yang melibatkan staff KJA Ashadi dan Rekan yang diharapkan dapat memberikan informasi dan data mengenai SP2DK.

1.5 Cara Pengumpulan Data

Pembahasan yang ditulis dalam Laporan Tugas Akhir harus sistematis dan juga dapat di buktikan kebenarannya dan terarah. Sistematika penulisan yang telah penulis susun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Menjelaskan mengenai latar belakang masalah dalam pemilihan judul, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulis, jenis dan juga metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR JASA AKUNTAN ASHADI DAN REKAN

Bab II menjelaskan mengenai sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi dan lingkup layanan yang diberikan oleh KJA Ashadi dan Rekan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab III bab ini menguraikan serta menjelaskan mengenai pembahasan tentang ruang lingkup penulisan yang telah di sampaikan. Penjelasan ini mengenai dasar hukum yang dikenakan, pengertian subjek, objek, wajib pajak. Selain itu Bab III juga berisi mengenai pembahasan dari penyelesaian SP2DK, prosedur yang digunakan, dan upaya yang dilakukan oleh KJA Ashadi dan Rekan.

BAB IV PENUTUP

Bab IV bab ini menguraikan kesimpulan dari Bab III yang membahas mengenai Penyelesaian SP2DK Atas Selisih Perhitungan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan PT XYZ Pada KJA Ashadi dan Rekan Bandung.